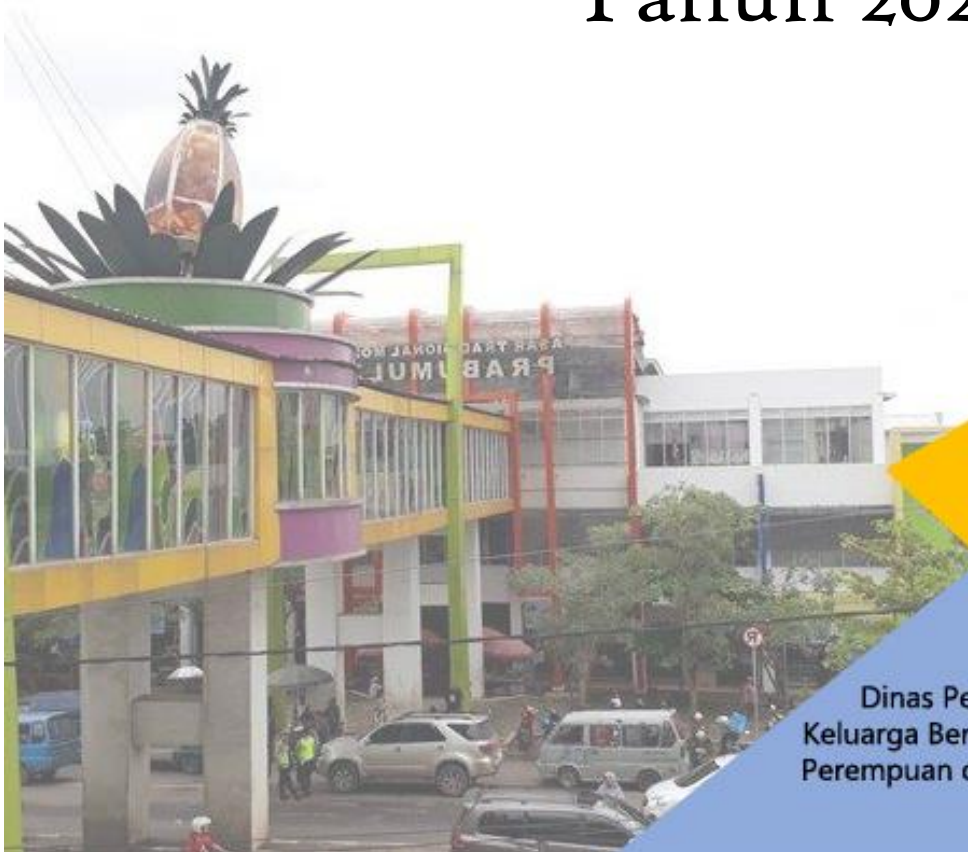




PEMERINTAH
KOTA PRABUMULIH

RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2025



Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya rancangan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Rancangan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan rancangan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai program kegiatan yang berkelanjutan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran dan target kinerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih dengan mengacu pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2025, DPPKBPPPA Kota Prabumulih menitikberatkan pada upaya penerapan berlakunya Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah.

Namun demikian pelaksanaan rancangan rencana kerja tahun 2025 DPPKBPPPA Kota Prabumulih pada akhirnya masih sangat tergantung kepada kemampuan anggaran yang disediakan untuk Perangkat Daerah tahun 2025. Sebagaimana telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Rancangan rencana kinerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih yang dapat diakomodir dalam anggaran Perangkat Daerah pada tahun anggaran tersebut belum dapat memenuhi anggaran yang telah direncanakan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih tahun 2025 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan kami. Untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang tulus kepada semua pihak, dan kami mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan dalam meningkatkan kesempurnaan baik dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja pada tahun berikutnya.

Harapan kami rancangan Rencana Kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025 yang telah disusun ini dapat diakomodir dalam anggaran OPD Tahun 2024, baik



APBD Kota Prabumulih maupun APBD Propinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari anggaran BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua, Aamiin.

Prabumulih, 29 Januari 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Prabumulih,



Eti Agustina, SKM, M.Kes
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 19720806 199205 2 002



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	40
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	61
3.3 Program dan Kegiatan	71
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	122
BAB V PENUTUP	132



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023	16
Tabel II.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 dan Realisasi Renstra	17
Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2019-2023.....	35
Tabel II.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2024-2026.....	36
Tabel II.5 Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome Pemerintah Daerah.....	37
Tabel II.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kota Prabumulih.....	45
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran DPPKBPPPA Prabumulih	69
Tabel III.2 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Prabumulih	78
Tabel IV.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan Tahun 2025.....	123



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Alur Penyusunan Rancangan Renja - PD	4
Gambar 2. Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran.....	6
Gambar 3. Bagan Alur Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Prabumulih dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah (PD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Perencanaan merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan pada dasarnya dimaksudkan dan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan pemerintah pusat dalam bidang otonomi daerah telah memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya dengan sasaran, terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Prabumulih. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih menyusun Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun DPPKBPPPA Kota Prabumulih membuat Renja yang merupakan rencana kegiatan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan tahun tersebut.

1.1.1 Pengertian Renja

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

DPPKBPPPA Kota Prabumulih merupakan Perangkat Daerah (PD) di Kota Prabumulih yang mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib pemerintahan bukan pelayanan dasar. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja PD menjadi mutlak, yaitu sebagai dokumen untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

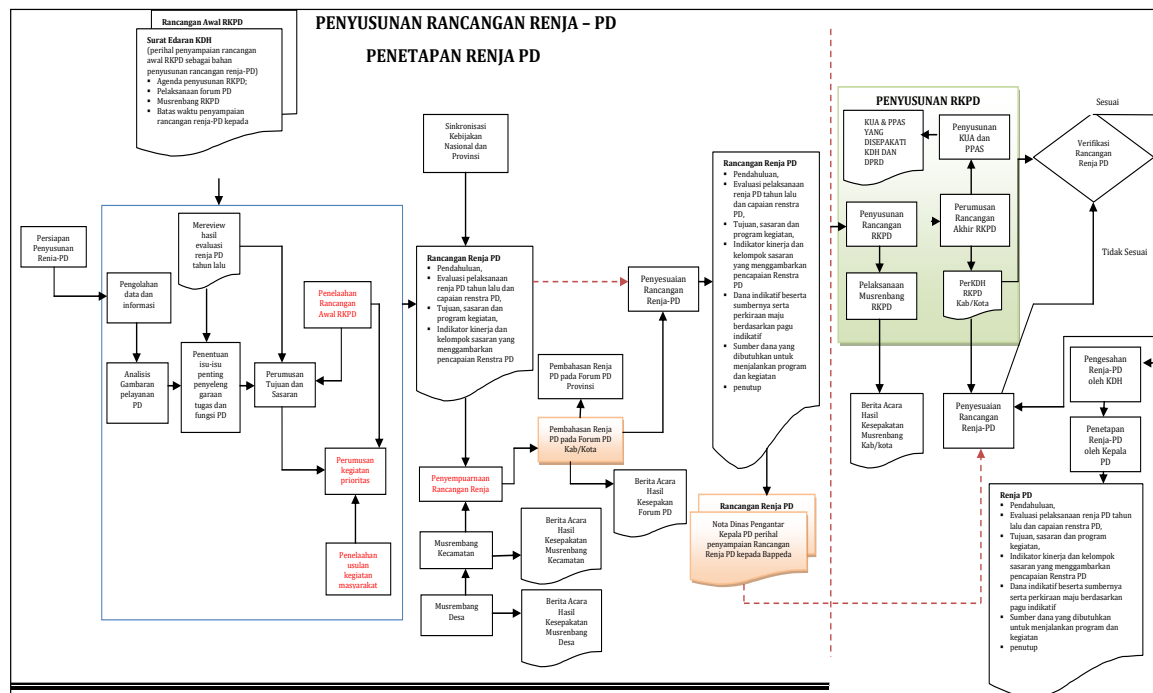
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara stimulan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.



3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan PD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA PD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1. Alur Penyusunan Rancangan Renja - PD

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

1. Pembentukan Tim Penyusun Renja
2. Orientasi mengenai Renja
3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
4. Pengumpulan Data dan Informasi

b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

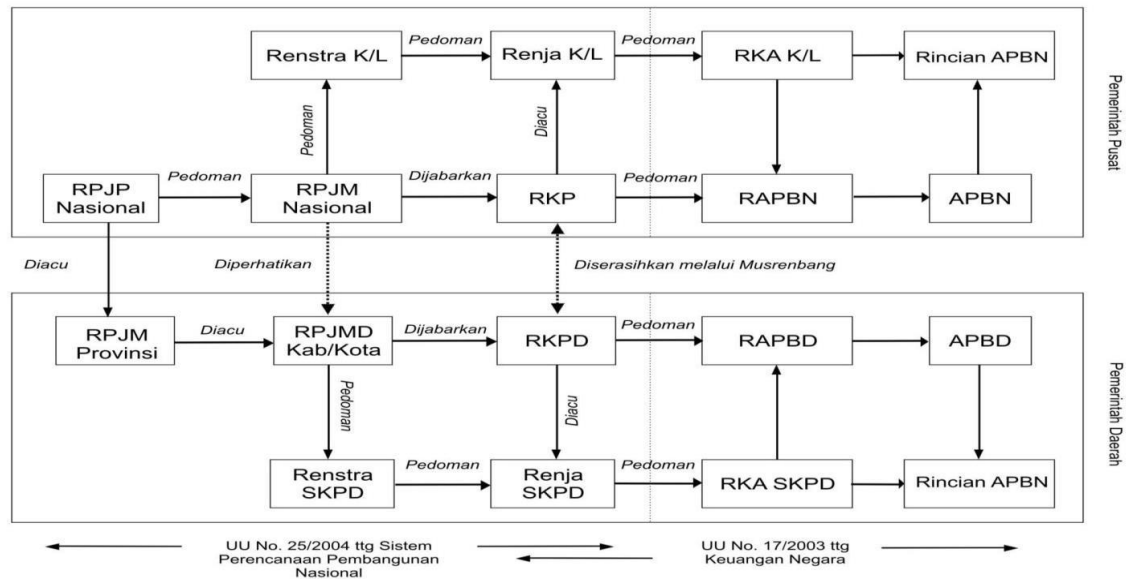
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan PD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
5. Telaah terhadap rancangan awal RKPD
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
11. Pembahasan forum OPD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah ini:



Gambar 2. Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

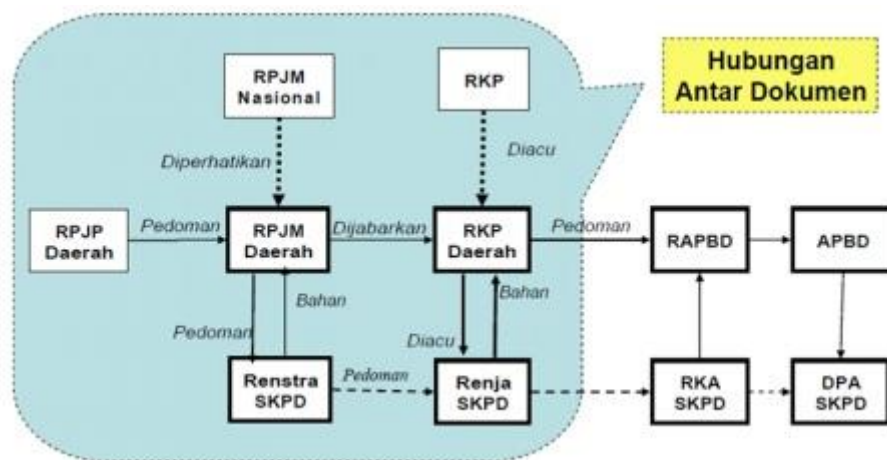
Rencana kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih adalah merupakan Penjabaran dari Renstra DPPKBPPPA selama kurun waktu 3 tahun yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan untuk periode satu (1) Tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh DPPKBPPPA Kota Prabumulih maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses Penyusunan Rencana kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu Penyusunan Rencana kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih dikerjakan secara stimulan/pararel yang memuat Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun-tahun sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap pencapaian Renstra DPPKBPPPA Kota Prabumulih.

Sebagai suatu dokumen resmi Renja DPPKBPPPA mempunyai fungsi sebagai penjabaran dari renstra DPPKBPPPA, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang Pengendalian penduduk Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta

menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Prabumulih demi terwujudnya visi Kota Prabumulih sebagai Kota Prima dan Berkualitas Tahun 2025

Rencana kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan potensi, kendala, tantangan dan peluang serta kebutuhan dan kemampuan daerah sehingga diharapkan akan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan RAPBD Kota Prabumulih Tahun 2025. Seluruh Dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Oleh sebab itu seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjuk dan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 3.Bagan Hubungan antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan Idiil dari Renja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih adalah Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Daerah. Ketentuan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- j) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
- m) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- o) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024;

- p) Peraturan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BKKBN Tahun 2020-2024;
- q) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2009 Nomor 1);
- r) Peraturan Daerah Kota Prabumulih No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Prabumulih.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah untuk :

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja DPPKBPPPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2024 adalah agar dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam renstra DPPKBPPPA 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja, fungsi Renja Tahun 2025, keterkaitan antara Dokumen Renja dengan Dokumen Renstra serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD

Capaian Renstra DPPKBPPPA Kota Prabumulih Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKBPPPA Kota Prabumulih berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan :

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan,
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi,
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional,
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan,
5. Rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan :

1. Proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh,
2. Kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang terkait dengan sasaran target kinerja Renstra.

3.3 Program dan Kegiatan

Memuat penjelasan tentang rencana program dan kegiatan serta tolak ukur kinerja sasaran.

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan DPPKBPPPA Kota Prabumulih.

BAB V : Penutup

Merupakan harapan akhir dari penyusunan Renja DPPKBPPPA Kota Prabumulih.

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra**

Hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPPKBPPPA Kota Prabumulih tahun lalu (tahun $n-2 = 2025-2 = 2023$) berdasarkan target indikator kinerja program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Program Pembinaan Keluarga Berencana, Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada kegiatan Pelayanan KB Medis Operasi Pria dan Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB serta Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK.

b. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023 yang memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

1. Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

c. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2023 yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan

Pada tahun 2023 tidak ada kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran.

d. Faktor - faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Tahun 2023

1. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada kegiatan pelayanan KB Medis Operasi adalah kurangnya motivasi kaum pria untuk menggunakan alat kontrasepsi vasektomi (KB Pria).
2. Faktor – faktor penyebab tercapainya kinerja dengan program-program yang mendukung capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagai berikut:
 - melaksanakan pelayanan KB/KR di 6 kecamatan dalam wilayah Kota Prabumulih.
 - melaksanakan kegiatan pergerakan pelayanan KB melalui kegiatan integrasi dengan Stekholder terkait melalui kegiatan momentum pelayanan KB
 - Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keluarga tentang pentingnya kesehatan reproduksi pada anak remaja melalui kegiatan sosialisasi, orientasi dan pembinaan dalam wadah kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).
 - Meningkatkan mutu dan kualitas layanan fasilitas kesehatan (Faskes) Keluarga Berencana.
 - Mengoptimalkan kelompok-kelompok Tribina yang ada agar berperan aktif dalam kegiatan serta meningkatkan SDM kader-kader Tribina di Lini Lapangan.
 - Meningkatkan sarana prasarana pelayanan dan penyuluhan KB.

e. Faktor - faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian target kinerja Tahun 2024

1. Kurangnya pemantauan dan pendampingan pelayanan KB secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam meminimalisasi dropout serta masih rendahnya penggunaan Alat Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) untuk menurunkan Total Fertility Rate (TFR).
2. partisipasi pria dalam ber-KB
3. Banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan seperti adanya tersangka yang pergi, kesulitan dalam pembuktian dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan KDRT.

4. Terbentuknya UPTD PPPA di Kota Prabumulih sebagai sarana untuk melakukan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban
 5. Belum adanya lembaga pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
 6. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan
 7. Belum optimalnya pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan
 8. Masih banyak OPD yang belum melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG)
 9. Belum optimalnya pembiayaan kegiatan pencegahan khusus sosialisasi terhadap masyarakat dan kelompok-kelompok resiko untuk menjadi korban dan pelaku.
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut**
1. Mengoptimalkan pelaksanaan program pengendalian penduduk.
 2. Meningkatkan kepesertaan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
 3. Meningkatkan koordinasi dan pemantauan data dengan instansi terkait.
 4. Penguatan strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD
 5. Penguatan Pokja PUG, Focal Point
 6. Meningkatkan kinerja UPTD PPPA di Kota Prabumulih sebagai sarana untuk melakukan pelayanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban

Adapun Realisasi program/kegiatan berdasarkan target indikator kinerja tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini :



Tabel II.1

Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan	Penyediaan Dana (Rp)	Realisasi		
				Keuangan (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)
1	Dinas Pengendalian Penduduk,	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2 Kegiatan	30.520.000,00	82,75	25.254,250,00	191,23
2	Keluarga Berencana,	Program Perlindungan Khusus Anak 1 Kegiatan	101.660.000,00	74,54	25.878.000,00	100
3	Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2 Kegiatan	128.160.000,00	36,04	46.193.000,00	100
4	dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga 1 Kegiatan	16.360.000,00	55,12	9.017.000,00	191,23
5		Program Perlindungan Perempuan 2 Kegiatan	538.300.000,00	25,16	135.410.750,00	100
6		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7 Kegiatan	4.085.581.901,00	78,66	3.213.864.714,00	100
7		Program Pengendalian Penduduk 2 Kegiatan	206.140.000,00	83,42	171.966.785,00	84,28
8		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 4 Kegiatan	2.268.741.000,00	82,92	1.881.279.000,00	103,25
9		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 2 Kegiatan	1.146.580.000,00	87,58	1.004.191.500,00	100



Tabel II.2

Evaluasi Pelaksanaan Program Renja DPPKBPPPA Tahun 2023 dan Realisasi Renstra

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Tahun 2023			Tahun 2024
					Target	Realisasi	Capaian (%) 8=(7/6)	Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1.1	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Persentase	14,5%	-	-	-	15,4%
1.1.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peserta Kb aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase	31,6%	27,9%	27,8%	99,64%	30,3%
1.1.1.1	Advokasi program KKBPK kepada stakeholder dan mitra kerja	Jumlah Organisasi yang Melaksanakan Program Bangsa Kencana	organisasi	10	25	24	96	10
1.1.1.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangsa kencana sesuai kearifan budaya local	Dokumen	1	1	1	100	1
1.1.1.3	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana melalui Media Massa, Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen	1	1	1	100	1



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.1.1.4	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa(Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya	Laporan	1	1	1	100	1
1.1.1.5	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan hasil pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Laporan	1	1	0	100	1
1.1.1.6	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	Laporan	1	1	1	100	1
1.1.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk	Persentase	100	1	100	100	100
1.1.2.1	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti pembinaan IMP dan program bangsa kencana di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi	6	6	6	100	6



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.1.2.2	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan	-	5	5	100	-
1.1.2.3	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader IMP	Orang	200	200	230	115	200
1.1.3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase	100	100	100	100	100
1.1.3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan Kb ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringan	Laporan	1	1	1	100	1
1.1.3.2	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang	-	32	32	100	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.1.3.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	1320	1317	1180	89,6	1320
1.1.3.4	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit sarana penunjang pelayanan KB	Unit	3	20	20	100	3
1.1.3.5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Orang	50	-	-	-	40
1.1.3.6	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah laporan dukungan operasional pelayanan Kb bergerak	Laporan	6	-	-	-	6
1.1.3.7	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Laporan	1	1	1	100	1
1.1.3.8	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Orang	-	64	64	100	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.1.4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Perangkat (Dinas/badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persentase	65	-	-	-	50
1.1.4.1	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	Dokumen	1	1	1	100	1
	Pelaksanaan dan Pengolahan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana	Kampung	37	37	37	100	37
1.2	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	Persentase	10	-	-	-	10
1.2.1	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Perangkat (Dinas/badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	Persentase	65	-	-	-	50



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.2.1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan pemanfaatan grand design Pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat kabupaten/kota	Dokumen	0	-	-	-	1
1.2.1.2	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informa	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan advokasi, sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur formal di satuan pendidikan jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur non formal dan informal	Satuan Pendidikan	10	4	4	100	-
1.2.1.3	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pamangku kepentingan	Organisasi	12	12	12	100	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.2.1.4	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Organisasi	12	-	-	-	12
1.2.2	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	Persentase	100	100	100	100	100
1.2.2.1	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di sektor lain	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB yang aktif untuk memperkuat integrasi program bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) di sector lain yang dibentuk	Unit	-	10	10	100	-
1.2.2.2	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan system informasi keluarga	Laporan	6	1	1	100	6
1.2.2.3	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	Laporan	1	-	-	-	1



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.2.2.4	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Dokumen	1	1	1	100	1
1.3	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan	Unit	6	-	-	-	6
1.3.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Persentase	60	-	-	-	50
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Unit	2	20	20	100	2
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Orang	40	50	50	100	40



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
1.3.1.1	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Orang	40	330	330	100	40
	Promosi dan Sosialisasi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Laporan	1	1	1	100	-
	Promosi dan Sosialisasi kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Laporan	1	1	1	100	1
1.3.1	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Capaian PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang ber-KB Mandiri	Persentase	60	-	-	-	50



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Laporan	1	1	1	100	-
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1	Program Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Persentase	100	30	57,37	191,23	80
2.1.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga /OPD yang mengikuti serangkaian PUG dan peningkatan kapasitas program PPRG	OPD	40	20	20	100	40
2.1.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota	Perangkat Daerah	36	36	36	100	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	Persentase	100		-		100
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang tersedia	Dokumen	2		1		2
	<i>Program Peningkatan Kualitas keluarga</i>	<i>Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan</i>	Persentase	100	100	100	100	100
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/ Kota	Angka	1		-		1
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Perangkat Daerah	-	36	36	100	-
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	Perangkat Daerah	24	-	-	-	24



No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	Orang	15	-	-	-	15
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani oleh instansi terkait	Persentase	100	100	100	100	100
	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/kota	Jumlah lembaga yang dibidang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Lembaga	35		-		35
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, program dan Kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	100	1
	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Persentase	100	100	100	100	100
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	Orang	25	10	10	100	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	Layanan	25	1	1	100	25
2.3	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Layanan terhadap anak korban kekerasan	Persentase	100	100	100	100	100
2.3.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	Lembaga	35	-	-	-	35
2.3.1.1	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	Orang	20	-	-	-	20
2.3.2	Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus kekerasan anak yang diselesaikan	Orang	15	-	-	-	15
2.3.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Orang	10	-	-	-	10
2.3.3	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	Lembaga	35	-	-	-	35



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
2.3.3.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	1	1	100	-
2.3.3.2	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	Orang	20	-	-	-	20
2.4	Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase pemenuhan hak anak	Persentase	100	100	100	100	100
2.4.1	Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	Persentase Jumlah satuan pendudukan yang didampingi menuju satuan pendidik ramah anak	Persentase	100	-	-	-	100
2.4.1.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha	Organisasi	10	6	6	100	-



No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target dan Capaian Tahunan Renstra Tahun 2024-2026				
				Target Akhir Renstra (2026)	Target	Tahun 2023 Realisasi	Tahun 2024 Capaian (%)	Tahun 2024 Target
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9
2.4.2	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	Lembaga	35	-	-	-	35
2.4.2.1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	100	-
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen	2	4	4	100	-

Adapun review dari Tahun 2023 terdapat 1 pelayanan dalam sub kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan disebabkan karena tidak ada akseptor KB Medis Operasi Pria yang bisa dilayani sehingga untuk kedepannya hal yang dapat dilakukan antara lain dengan meningkatkan KIE tentang KB medis operasi pria melalui sosialisasi, pendekatan dan lain sebagainya.

Untuk program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan akan tetapi terdapat sisa lebih dari anggaran disebabkan karena langkah penghematan belanja jasa Kantor yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD dan sesuai dengan standar belanja yang telah diatur.

Dalam hal ini pengambilan kebijakan/tindakan tidak terlalu signifikan karena untuk hasil dari pelaksanaan kegiatan sebagian besar sudah sesuai dengan perencanaan. Jadi gambaran tentang pelaksanaan Renja 2023 di DPPKBPPPA Kota Prabumulih, dapat dikatakan berjalan dengan cukup baik dengan berbagai catatan penting dalam usaha menjalankan Anggaran sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk kedepan Tahun 2025 kami banyak belajar dari pengalaman serta kekurangan pada tahun 2023 sehingga diharapkan kesempurnaan pelaksanaan Renja dapat dicapai, baik dari pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan secara administrasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan DPPKBPPPA dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKBPPPA Kota Prabumulih yang telah tertuang dalam Renstra DPPKBPPPA Tahun 2018-2023.

Dalam mencapai tujuan, maka DPPKBPPPA Kota Prabumulih menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran yang akan dicapai oleh DPPKBPPPA Kota Prabumulih tahun 2023 telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang memuat beberapa program kegiatan

DPPKBPPPA Kota Prabumulih dengan Program utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan KB serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tahun anggaran 2023 antara lain :

- a. Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dengan keputusan kepala dinas.
- b. Menunjuk Pejabat pengadaan/panitia pengadaan, panitia pemeriksa dan penerima untuk kegiatan pengadaan dengan pagu anggaran dibawah 200 juta.
- c. Mengusulkan penunjukkan petugas penyimpan barang, pengurus barang, Bendahara pengeluaran, Bendahara penerimaan, dan pembantu bendahara pengeluaran (Bendahara gaji),
- d. Membentuk panitia kegiatan dengan keputusan Walikota Prabumulih dan atau keputusan Kepala Dinas.
- e. Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan(Kerangka Acuan Kegiatan)
- f. Melaksanakan monitoring dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tupoksinya.
- g. Menyampaikan nota dinas kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk memproses pengadaan barang/jasa dengan anggaran diatas 200 juta.
- h. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap dan kerangka acuan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- i. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan jadwal yang telah disepakati.
- j. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggung-jawaban keuangan.

Pada Tahun 2023 DPPKBPPPA Kota Prabumulih telah melaksanakan 9 Program 23 Kegiatan dan 63 Sub Kegiatan, dengan beberapa capaian 5 (Lima) indikator sebagai berikut:

1. Realisasi indikator sasaran Angka Kelahiran Total per wanita Usia Subur (15-49 Tahun) sebesar 2,45 dengan capaian kinerja 91,59% dari target sebesar 2,26 meningkat dari capaian tahun 2022 yaitu sebesar 2,65.
2. Pada indikator sasaran Anugerah Parahita Ekapraya (APE) capaian kinerja telah terpenuhi sejak Tahun 2021 katagori Pratama dengan score 127,03 untuk kedua

kalinya pada Tahun 2023 Kota Prabumulih mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Predikat Pratama dengan score 683,25 dari target 95.

3. Realisasi indikator sasaran Ratio KDRT sebesar 0,006 dengan capaian kinerja 191,43 dari target sebesar 0,07
4. Pada Indikator sasaran Predikat Kota Layak Anak capaian kinerja telah terpenuhi di Tahun 2022 predikat pratama dengan score 530,30. Dan Pada Tahun 2023 Kota Prabumulih mendapatkan kembali penghargaan Kota Layak Anak (KLA) walaupun dengan predikat Pratama akan tetapi score meningkat menjadi 756,70 dari target sebesar 400.
5. Pada Indikator NILAI SAKIP capaian kinerja pada Tahun 2023 tercapai sebesar 79,29 dari target sebesar 55.
6. Untuk Indikator Persentase tindak lanjut hasil temuan dan pengawasan dapat dilaksanakan dan dicapai sebesar 100%

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan sebagai berikut :



Tabel II.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPPKBPPPA
KOTA PRABUMULIH 2019-2023

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/ NILAI TARGET/ STANDAR (IKU/SPM/ IKK) (3)	TARGET RENSTRA PD					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)	(12)	(13)	(14)
1	Angka Kelahiran Total per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun)		2,38	2,38	2,33	2,29	2,26	2,39	2,385	2,56	2,65	2,45	-	-	
2	Anugerah Parahita Ekapraya (APE)		Prata ma (93)	Prata ma (93,5)	Prata ma (94)	Prata ma (94,5)	Prata ma (95)	-	-	127,03	127,03	683,25	-	-	
3	Ratio KDRT		0,1	0,09	0,085	0,07	0,07	0,03	0,03	0,082	0,003	0,006	-	-	
4	Predikat Kota Layak Anak		Prata ma (95)	Prata ma (100)	Prata ma (200)	Prata ma (300)	Prata ma (400)	76	-	-	530,30	756,70	-	-	
5	Nilai SAKIP		50	51	52	53	55	-	-	51,68	70,54	79,29	79,30	79,31	
6	Persentase Penanganan Tidak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



Tabel II.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPPKBPPPA
KOTA PRABUMULIH 2024-2026

NO	INDIKATOR (IKU, SPM, IKK)	ANGKA/ NILAI TARGET/ STANDAR (IKU/SPM/ IKK)	TARGET RENSTRA PD			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(10)	(12)	(13)	(14)
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		1,4	1,45	1,5	-	1,4	1,45	
2	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani		0,013	0,012	0,01	-	0,013	0,012	
3	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		2,5	2,4	2,3	-	2,5	2,4	
4	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)		59,9	60,1	60,4	-	59,9	60,1	
	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFR)		17,9	17,6	17,3	-	17,9	17,6	
5	Nilai SAKIP		79,30	79,31	79,32	-	79,30	79,31	
6	Persentase Penanganan Tidak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan		100	100	100	-	100	100	

Tabel II.5

**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome
Pemerintah Daerah**

NO	URUSAN / INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET	
			2024	2025
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69,5%	70,7%	71,6%
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	16%	33%	30%
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	-	-	-
2.4	Ratio KDRT	2,65	2,5	2,4
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	-	-	-
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	80	80	80
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	-	-	-
2.10	Cakupan penegakkan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	-	-	-



NO	URUSAN / INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET	
			2024	2025
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	-
2.13	Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan	-	-	-
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,72	1,70	1,68
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,45	2,2	2,2
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	50	60
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	10	10
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	-
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-	-
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	3 Jalur (Formal, nonformal dan informal)	3 Jalur (Formal, nonformal dan informal)	3 Jalur (Formal, nonformal dan informal)
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2-3 Anak	2-3 Anak	2-3 Anak
8.9	Ratio Akseptor KB	69,4	70	72



NO	URUSAN / INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET	
			2024	2025
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	36,62	17,9	17,6
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	19,05 kelahiran per 1000 WUS 15- 19 Tahun	19 kelahiran per 1000 WUS 15-19 Tahun	18,5 kelahiran per 1000 WUS 15- 19 Tahun
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,66%	0,63%	0,6%
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	24,38	15,4	14,9
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,3	28	30
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	69,26%	70%	72%
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,81%	78%	79%
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	60,58%	61%	62%
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	70,27%	71%	72%
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	1	1	1
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	96%	96,5	96,75%
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	100%	100%	100%

NO	URUSAN / INDIKATOR	CAPAIAN 2023	TARGET	
			2024	2025
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	1	1	1
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%	100%	100%
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100%	100%	100%
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	60%	65%	68%
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	-
8.28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	50%	55%
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	-	70%
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	23	22
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,03%	1 %	1,25%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

A. Tingkat Kinerja Pelayanan

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih tahun 2023 berhasil dicapai. Dengan demikian sasaran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih selama 5 (lima) tahun pada periode 2018-2023 berhasil dicapai.

B. Dampak terhadap Capaian Visi Misi Kepala Daerah, serta Capaian Program Nasional

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih sebagai penjabaran dari visi misi Kota Prabumulih akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran Renstra Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Pusat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak”, dalam hal ini terkait dengan misi kedua kota Prabumulih yaitu peningkatan sumber daya masyarakat yang berkualitas, berprestasi dan Religius pada setiap lini kehidupan. Hal ini ditunjang dengan tujuan dari Dinas Pengendalian penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak kota Prabumulih yaitu Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan jumlah keluarga sejahtera, Meningkatkan kesetaraan gender dan anak serta pemberdayaan perempuan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat pelayanan Perangkat Daerah untuk mencapai visi, misi dan Program KDH dan WKDH karena kurang optimalnya kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia di daerah.

C. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan dan peluang Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih selama 5 (lima) tahun adalah sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

1. Tantangan dalam Meningkatkan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih meliputi :

- a) Tingkat kesertaan kaum pria untuk ikut Keluarga Berencana masih rendah,

- b) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan KB yang bermutu,
- c) Tuntutan pelayanan KB gratis dari masyarakat,
- d) Pencapaian Keluarga yang mempunyai balita dan anak, remaja dan lansia yang aktif dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja serta keluarga lansia masih rendah
- e) Adanya sumber data yang berbeda-beda dari tiap Dinas/Badan/Kantor seperti data jumlah penduduk,
- f) Belum optimalnya keberadaan kelembagaan pemberdayaan perempuan,
- g) Sistem data dan informasi kependudukan belum berjalan seperti yang diharapkan,
- h) Data belum dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan,
- i) Banyak data kependudukan, namun belum diolah sehingga belum bisa dijadikan informasi.

2. Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih meliputi :

- a) Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendukung pelayanan bidang keluarga berencana,
- b) Tingginya animo masyarakat ikut ber-KB,
- c) Adanya dukungan dana alokasi khusus (DAK) untuk urusan keluarga berencana setiap tahun dari pusat,
- d) Banyaknya permintaan dan kebutuhan data program KB dan KS terutama untuk pembangunan keluarga sejahtera,
- e) Terbentuknya UPTD PPA Kota Prabumulih,
- f) Adanya penyerasian kebijakan di bidang kependudukan dan pembangunan.

D. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diklasifikasikan berdasarkan

permasalahan per bidang yang terdapat di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti dibawah ini:

1. Permasalahan terkait bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - a) Masih tingginya angka kelahiran total (TFR)
 - b) Unmetneed tinggi
Persentase padangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi (unmeetned) masih tinggi menyebabkan capaian Total Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate/TFR*) masih tinggi
 - c) Rendahnya Partisipasi laki-laki ber KB
 - d) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM tenaga penyuluh
 - e) Masih rendahnya minat aseptor KB untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - f) Kualitas dan kuantitas kader dan petugas masih harus ditingkatkan untuk mencapai SDGs yang diharapkan
2. Permasalahan terkait bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a) Belum maksimalnya pencapaian pengarusstamaan gender dilihat dari kecilnya persentase perempuan yang berperan di lembaga pemerintah, legislatif dan sektor swasta
 - b) Belum optimalnya kelembagaan PUG
 - c) Masih adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum mendapatkan penanganan optimal
 - d) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus KDRT meningkat
 - e) Belum optimalnya upaya meningkatkan partisipasi keluarga untuk meningkatkan ketahanan keluarga
 - f) Belum optimalnya ketersediaan data terpilah dalam SIGA
 - g) Belum optimalnya upaya Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - h) Masih rendahnya cakupan layanan terhadap anak korban kekerasan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan telah dilaksanakannya program kegiatan tahun 2023 dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 yang telah disyahkan, maka dapat disusun rancangan program kegiatan yang akan diusulkan untuk dapatkan alokasi anggaran tahun 2025, pengusulan dan penyusunan Rencana alokasi anggaran tahun 2025 dilakukan melalui Musrenbang.

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Musrenbang tersebut merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Prabumulih, menyelenggarakan Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota Prabumulih.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dan antar pemerintah daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja SKPD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan.

- a. Data usulan dari Kecamatan yang difasilitasi dengan kegiatan Musrenbang Kecamatan;
- b. Data usulan dari PD yang tertuang dalam RENJA Awal PD;
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kota Prabumulih, yaitu hasil dari Forum Gabungan PD dimana usulan Kecamatan dan Usulan PD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG KOTA Prabumulih;

Renja akhir PD merupakan hasil dari musrenbang Tingkat Kota Prabumulih yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan lanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, sebagaimana pada tabel IV berikut ini :



TABEL II.6
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
KOTA PRABUMULIH

NAMA PERANGKAT DAERAH : DPPKBPPPA

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	KOTA PRABUMULIH	Nilai SAKIP kota	79,31	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.000.000,00	100%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPPKBPPPA	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1.000.000,00	2 Dokumen
b	Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.000.000,00	1 Dokumen
c	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.000.000,00	1 Dokumen
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.000.000,00	1 Laporan
e	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPPKBPPPA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000,00	1 Laporan
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan yang tepat waktu	3.576.405.271,00	100%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPPKBPPPA	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.359.064.477	31 Orang/bulan
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	54.010.000,00	1 Dokumen
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.000.000,00	1 Laporan



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.000.000,00	1 Laporan
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase administrasi barang milik daerah yang akurat	13.200.000,00	100%
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DPPKBPPPA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.200.000,00	1 Laporan
4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian yang akurat	85.000.000,00	100%
a	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	DPPKBPPPA	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	35.000.000,00	40 Paket
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	DPPKBPPPA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000,00	10 Orang
5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi umum	665.106.645,00	100%
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA PRABUMULIH	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	181.000.000,00	6 Paket
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	KOTA PRABUMULIH	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1.500.000,00	1 Paket
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KOTA PRABUMULIH	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8.000.000,00	1 Paket
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KOTA PRABUMULIH	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	8.258.650,00	1 Paket
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	KOTA PRABUMULIH	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	5.600.000,00	1 Dokumen
f	Penyediaan Bahan/Material	KOTA PRABUMULIH	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	24.500.000,00	1 paket
g	Fasilitas Kunjungan Tamu	KOTA PRABUMULIH	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	10.000.000,00	12 Laporan
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KOTA PRABUMULIH	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	426.247.995,00	100 Laporan



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Persentase pengadaan barang milik daerah	169.650.000,00	100%
a	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	KOTA PRABUMULIH	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	169.650.000,00	1 Unit
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	18.999.000,00	100%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KOTA PRABUMULIH	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000,00	1 Laporan
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KOTA PRABUMULIH	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	10.999.000,00	1 Laporan
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KOTA PRABUMULIH	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7.000.000,00	1 Laporan
8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase barang milik daerah yang terpelihara	113.883.730,00	100%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	KOTA PRABUMULIH	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	113.883.730,00	73 unit
II	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan		Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80%	
1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota		Jumlah lembaga/OPD yang mengikuti serangkaian PUG dan peningkatan kapasitas program PPRG	15.000.000,00	40
a	Advokasi kebijakan dan penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi kebijakan dan pendampingan penyelenggaraan pengarusutamaan gender (PUG) kewenangan kabupaten/kota	15.000.000,00	36 orang
III	Program Perlindungan Perempuan		Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani oleh instansi terkait	100%	
1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah lembaga yang dibidang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	50.740.000,00	35 lembaga
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	50.740.000,00	1 Dokumen
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan		Persentase korban kekerasan perempuan yang	139.460.000,00	100%



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		terlayani		
a	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	30.000.000,00	25 Orang
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	109.460.000,00	40 Orang
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80%	
1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	15.000.000,00	1
a	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	15.000.000,00	36 Perangkat Daerah
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak		Persentase ketersediaan data terpilah dalam informasi gender dan anak (SIGA)	100%	
1	Kegiatan Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah data terpilah dalam SIGA	30.000.000,00	1
a	Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/kota	KOTA PRABUMULIH	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	30.000.000,00	1 Dokumen
VI	Program Pemenuhan Hak Anak		Persentase pemenuhan hak anak	100%	
1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/kota		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	220.000.000,00	35
a	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota	Kota Prabumulih	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	60.000.000,00	30 Orang



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
b	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup tingkat daerah kab/kota	Kota Prabumulih	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	30.000.000,00	1 Dokumen
c	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Prabumulih	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	130.000.000,00	1 Dokumen
VII	Program Perlindungan Khusus Anak		Cakupan layanan terhadap anak korban kekerasan	100%	
1	Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	50.760.000,00	35
a	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Prabumulih	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	50.760.000,00	125 orang
2	Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah Kasus kekerasan anak yang diselesaikan	126.020.000,00	15
a	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	KOTA PRABUMULIH	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	126.020.000,00	10 Layanan
3	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	69.020.000,00	35 lembaga
a	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	KOTA PRABUMULIH	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	69.020.000,00	20 orang



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VIII	Program Pengendalian Penduduk		Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	10 OPD	
1	Kegiatan Pemaudan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk		Persentase Perangkat (Dinas/badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	50.000.000,00	100%
a	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Kota Prabumulih	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepada pamangku kepentingan	50.000.000,00	12 organisasi
2	Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	135.000.000,00	100%
a	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Prabumulih	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	63.000.000,00	1 laporan
b	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Prabumulih	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	72.000.000,00	1 dokumen
IX	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14.9%	
1	Kegiatan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal		Persentase peserta Kb aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	867.600.000,00	31%
a	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Kota Prabumulih	Jumlah laporan hasil Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangsa kencana (pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana)	297.600.000,00	1 laporan
b	Pengendalian Program KKBPK	Kota Prabumulih	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	140.000.000,00	1 laporan
c	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Kota Prabumulih	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangsa kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	90.000.000,00	1 Laporan



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
d	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Prabumulih	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program bangsa kencana keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	100.000.000,00	1 dokumen
e	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Prabumulih	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal	40.000.000,00	1 dokumen
f	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Prabumulih	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana kepada stake holder dan mitra kerja	200.000.000,00	12 organisasi
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk	141.000.000,00	100
a	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Kota Prabumulih	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas Keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana	30.000.000,00	1 Laporan
b	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Kota Prabumulih	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	111.000.000,00	200 Orang
3	Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	370.281.000,00	100
a	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Kota Prabumulih	Jumlah laporan penganadlian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	30.600.000,00	1 Laporan
b	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Kota Prabumulih	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	375.381.000,00	1320 Orang
c	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	KOTA PRABUMULIH	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24.300.000,00	1 Laporan



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
g	Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	KOTA PRABUMULIH	Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	60.000.000,00	30 Orang
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB		Persentase Perangkat (Dinas/badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	446.750.000,00	60%
a	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	KOTA PRABUMULIH	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	3.750.000,00	1 dokumen
b	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	KOTA PRABUMULIH	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana	443.000.000,00	45 kampung
X	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera		Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan	6	
1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	188.000.000,00	55
a	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	KOTA PRABUMULIH	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	48.000.000,00	4 unit
b	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Kota Prabumulih	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	60.000.000,00	30 Orang
c	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	KOTA PRABUMULIH	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	80.000.000,00	1 laporan
2	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Capaian PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang ber-KB Mandiri	100.000.000,00	55



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Prabumulih	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	143.954.000,00	1 Laporan
b	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	KOTA PRABUMULIH	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	450.000.000,00	1 Dokumen
c	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	KOTA PRABUMULIH	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	495.000.000,00	1 Laporan
TOTAL				8.609.498.852,00	

Keterangan :

Program : 10 Program

Kegiatan : 25 Kegiatan

Sub Kegiatan : 60 Sub Kegiatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1.1.1 Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat

Berbagai tingkatan dalam penyuanaan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2019-2024, baik pada level sasaran program (outcome), sasaran kegiatan (output), indikator RPJMN, Indikator Kinerja (IKK), level komponen maupun pada level sub komponen sekalipun, harus dirumuskan dengan memperhatikan keterkaitannya pada visi dan misi Pemerintah (Kabinet Kerja) periode 2019-2024. Berdasarkan hal tersebut, kemudian disusun tujuan dan sasaran strategis lembaga BKKBN yang mengerucut pada upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah.

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2019-2024, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2019-2024, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah untuk **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan berkepribadian Berlandaskan gotong royong”**.

Sebagaimana tertera dalam RPJMN 2019-2024, untuk mewujudkan Visi di atas melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum
3. Mewujudkan politik Luar Negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Upaya perwujudan Visi dan Misi Pembangunan tersebut, telah disusun strategi pembangunan nasional, diantaranya melalui norma pembangunan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran dan produktivitas rakyat lapisan menengah ke bawah guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini kemudian didukung dengan fokus pada 3 (tiga) Dimensi Pembangunan, yaitu: 1) Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat; (2) Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan; 3) Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan. Dalam hal ini BKKBN masuk di dalam Dimensi Pembangunan yang pertama “Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat”.

Tujuan BKKBN

Dengan berpedoman pada arah pembangunan Pemerintahan sebagaimana tertera dalam Buku I – RPJMN 2019-2024, BKKBN berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sebagaimana dijabarkan di atas dengan perumusan tujuan untuk “Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang seimbang”, dengan berfokus kepada:

- (1) Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,
 - (2) Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif, (3) Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistic integrative sesuai siklus hidup, (4) Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global,
 - (5) Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi, (6) Membangun kelembagaan,
- meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur.

Sasaran Strategis BKKBN

Untuk memastikan tujuan BKKBN dapat tercapai, maka ditetapkan sasaran strategis BKKBN 2019-2024, yaitu:

1. Menurunnya TFR dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada tahun 2024,
2. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) 61,78 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 % pada tahun 2024,
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/unmet need 8,6 % pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 % pada tahun 2024,
4. Menurunnya angka kelahiran menurut kelompok umur 15-19 tahun (ASFR 15-19 tahun) dengan target 25/1000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18/1000 kelahiran pada tahun 2024,
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebesar 53,57 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024,
6. Meningkatnya median usia kawin pertama (MUKP) 21,9 tahun pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 22,1 pada tahun 2024.

Ke-6 (enam) Sasaran Pakai Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penguangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

1.1.2 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan

Kajian telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai visi “Mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dengan misi :

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang,

2. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif,
3. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup.

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020- 2024 yang tertera pada Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024 dalam upaya untuk mencapai tujuan utama, sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,33 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,19 pada 2024,
2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 65,29 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 67,03 persen pada tahun 2024,
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/UnmetNeed 7,88 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,16 persen pada 2024,
4. Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 26 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 19 per1.000 kelahiran pada 2024,
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 52,47 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 58,2 pada tahun 2024,
6. Meningkatkan Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 20,9 tahun pada 2020.menjadi 21 tahun pada 2024.

1.1.3 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Visi

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden. Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu: **"Kementerian yang PEDULI (Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan Integritas) dalam mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong"**.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan dari kekerasan termasuk TPPPO;
2. Peningkatan perlindungan anak; dan
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan,
2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak,
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA,
4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO,
5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak,
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota Prabumulih, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih selama tiga tahun.

Berpedoman pada Visi RPJPD Kota Prabumulih 2005-2025:

“PRABUMULIH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI”

Visi tersebut akan diwujudkan dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Merata,
Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan dengan upaya mendorong pengembangan sector utama perekonomian Kota Prabumulih yaitu perdagangan dan jasa; pertambangan dan bahan galian; pertanian, hotel dan restoran; dan industry, sebagai penggerak ekonomi utama (*prime mover*) dan menjadi tulang punggung tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan tetap menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada di segala bidang dengan kerjasama pemerintah dan masyarakat.
2. Mewujudkan masyarakat berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan berkualitas,
Melalui peningkatan peran sector agama, pendidikan, kesehatan dan sector-sektor pembangunan lainnya; yaitu dengan upaya mendorong pembangunan masyarakat secara menyeluruh dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat seutuhnya baik jasmani maupun rohani, makhluk pribadi maupun sosial dalam kerangka nilai-nilai humanis dan religious.
3. Mewujudkan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas dan berkelanjutan,
Melalui peningkatan peran sector infrastruktur, sehingga mampu meningkatkan aktivitas pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Prasarana dan sarana wilayah diperlukan untuk mengembangkan wilayah pembangunan agar mampu mendukung dan mewadai aktivitas pengembangan ekonomi secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik,
Melalui peningkatan kinerja aparatur diharapkan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang didukung oleh perangkat daerah yang efektif dan

efisien, aparaturnya yang profesional, infrastruktur yang memadai, dalam suasana politik, hukum dan kamtibmas yang kondusif.

A. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) - 3 (tiga) tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Penetapan tujuan didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Prabumulih.

Adapun rumusan tujuan DPPKBPPPA Kota Prabumulih untuk mewujudkan visi dan Misi adalah:

Tujuan 1 : Meningkatnya Kesenjangan Gender;

Tujuan 2 : Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Jumlah Keluarga Sejahtera;

Tujuan 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh DPPKBPPPA Kota Prabumulih dalam jangka waktu tiga tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SWOT". Analisis SWOT digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu KEKUATAN (*STRENGTH*), KELEMAHAN (*WEAKNESS*), PELUANG (*OPPORTUNITIES*), dan TANTANGAN (*THREAT*).

Sasaran dalam Rencana Strategis DPPKBPPPA Kota Prabumulih Periode Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender;
2. Meningkatnya Pengendalian Kependudukan dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
3. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dilakukan dengan cara/strategi yaitu:

1. Peningkatan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana
3. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi
4. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja
5. Peningkatan Pembangunan Keluarga
6. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
7. Pemenuhan Hak Anak
8. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
9. Menjadikan BKKBN sebagai pusat data dan informasi kependudukan yang handal

Dari cara pencapaian tujuan diatas, maka upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih adalah :

1. Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2. Jaminan ketersediaan alat kontrasepsi di setiap fasilitas pelayanan KB
3. Pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai
4. Peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB
5. M Penguatan strategi advokasi dan KIE tentang Program Bangga Kencana yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas pemerintah daerah
6. KIE dan peningkatan advokasi Program Bangga Kencana (media, audiensi dan momentum) kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah dan berbagai media massa dan media luar ruang serta intensifikasi advokasi dan KIE melalui media lini bawah (below the line)
7. Peningkatan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi

8. Peningkatan pergerakan mekanisme operasional lini lapangan Program Bangga Kencana, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat
9. Koordinasi terpadu lintas sektor (lintas dinas/badan) terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan Kampung KB)
10. Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum Musrembang Desa/Kelurahan, Musrembang Kecamatan dan Musrembangda)
11. Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat waktu
12. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi
13. Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan
14. Peningkatan strategi yang komprehensif dan terpadu, antar sektor dan antara provinsi dan daerah, tentang KIE dan konseling Kesehatan Reproduksi Remaja dengan melibatkan orang tua, teman sebaya, toga/toma, sekolah, dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja
15. Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan
16. Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe); d) Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka

17. Peningkatan Pola Asuh dan pendampingan remaja/peningkatan kreatifitas dan karakter remaja serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja
18. Pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat
19. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga
20. Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan
21. Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga
22. Penguatan Pemahaman 8 fungsi keluarga
23. Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga
24. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan
25. Meningkatkan pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan materi KIE
26. Peningkatan Peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi
27. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
28. Meningkatkan kompetensi SDM (APH, Pekerja Sosial, dan lain-lain) dalam upaya memberikan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan dan TPPO

29. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyediaan layanan rujukan akhir yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan
30. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan cakupan dan kualitas data kekerasan (termasuk TPPO) dan membangun sistem data kekerasan terpadu (dengan lembaga layanan, Forum Pengada Layanan, dan lain-lain) (Pengembangan SIMFONI-PPA)
31. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak
32. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan
33. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial
34. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi rehabilitasi sosial anak
35. Peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi seluruh anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya melalui standarisasi lembaga penyedia layanan dan SDM pemberi layanan termasuk layanan pengasuhan anak pada daycare/tempat penitipan anak
36. Peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kematangan usia hidup melalui peningkatan kapasitas forum anak
37. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data yang memerlukan perlindungan khusus melalui peningkatan cakupan dan kualitas serta membangun sistem data kekerasan lintas kementerian/lembaga/perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang memberikan layanan sejenis. (Pengembangan SIMFONI-PPA)

38. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan berkesinambungan
39. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku
40. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapainya target kinerja
41. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan standar
42. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan kelengkapan mekanisme kerja meliputi pemetaan proses bisnis, penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam kelompok kerja



Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran DPPKBPPPA Kota Prabumulih

Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
							2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1.1	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender	1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	1,4	1,45	1,5
			2	Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	0,013	0,012	0,01
			3	Meningkatnya Perlindungan Perempuan	3	Ratio Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	2,5	2,4	2,3



Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun		
							2024	2025	2026
(1)		(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1.2	Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk dan Meningkatkan Jumlah Keluarga Sejahtera	Total Fertility Rate/TFR (Angka Kelahiran Total)	1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Penguatan tata Kelola Kependudukan	1	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)	59,9	60,1	60,4
					2	Angka Kelahiran menurut Kelompok Umur (ASFR) 15-49 Tahun	17,9	17,6	17,3
1.3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih	Nilai SAKIP Kota	1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1	Nilai SAKIP	79,30	79,31	79,32
					2	Persentase Penanganan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih, perlu disusun program kerja yang berkesinambungan dengan mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan sebagai rencana pembangunan jangka menengah.

Dengan telah dilaksanakannya program kegiatan tahun 2023 dan pelaksanaan program kegiatan tahun anggaran 2024 yang telah disahkan, maka dapat disusun rancangan program kegiatan yang akan diusulkan untuk mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2025.

Dengan disusunnya rancangan program kegiatan tahun 2025, maka dapat diketahui kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan perhitungan anggaran serta tolak ukur kinerja sasaran yang akan dicapai.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2025:

- Jumlah Program : 10
- Jumlah Kegiatan : 25
- Jumlah Sub Kegiatan : 60
- Pagu Indikatif APBD : Rp. 8.609.498.852,-

Rencana Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas DPPKBPPPA di Tahun 2025 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan dan Gaji Tunjangan ASN
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 6) Penyediaan Bahan Material
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan

- a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

3. Program Perlindungan Perempuan

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

- a. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/kota

6. Program Pemenuhan Hak Anak

- a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota
 - 1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- 2) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Perlindungan Khusus Anak

- a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
- b. Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah/Kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
- c. Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota

8. Program Pengendalian Penduduk

- a. Kegiatan Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
 - 1) Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
- b. Kegiatan Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota
 - 1) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 2) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB

9. Program Pembinaan Keluarga Berencana

- a. Kegiatan Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal
 - 1) Pengendalian program KKBPK
 - 2) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan Bangga Kencana
 - 3) Pelaksanaan mekanisme operasional program Bangga Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok)
 - 4) Promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
 - 5) Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Bangga Kencana sesuai kearifan budaya lokal
 - 6) Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota
 - 1) Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 3) Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya
 - 4) Peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

- 1) Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- 2) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 2) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)
- 3) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

- b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- 1) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakkan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- 2) Pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)
- 3) Pendampingan keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, ibu hamil, pasca salin/kelahiran, baduta/balita)



Uraian rumusan rencana program dan kegiatan DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

TABEL III.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA PRABUMULIH

PERANGKAT DAERAH : DPPKBPPPA

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				8.647.298.852,00				10.120.668.134,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.647.298.852,00				10.120.668.134,00
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				716.000.000,00				652.000.000,00
1,	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80 %	80 %	15.000.000,00			80 %	140.000.000,00
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/OPD yang mengikuti serangkaian PUG dan peningkatan kapasitas program PPRG	40 OPD	40 OPD	15.000.000,00			40 OPD	25.000.000,00
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>	36 Orang	36 Orang	15.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Orang	25.000.000,00
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>	24 Lembaga	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	24 Lembaga	60.000.000,00
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	15 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Orang	35.000.000,00
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	20.000.000,00
2,	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase korban kekerasan perempuan yang ditangani oleh instansi terkait	100 %	100 %	190.200.000,00			100 %	55.000.000,00
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga yang dibidang terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan	35 Lembaga	35 Lembaga	50.740.000,00			35 Lembaga	15.000.000,00
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	50.740.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.00 0.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</i>	100 %	100 %	139.460.000,00			100 %	30.000.000,00
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>	75 Orang	25 Orang	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Orang	15.000.000,00
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	75 Layanan	25 Layanan	109.460.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	25 Layanan	15.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pelatihan	10 Lembaga	-	0,00			10 Lembaga	10.000.000,00
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Orang	10.000.000,00
3,	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	80 %	80 %	15.000.000,00			80 %	30.000.000,00
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah program PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	1 program	1 program	15.000.000,00			1 program	30.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	15.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36 Perangkat Daerah	30.000.000,00
4,	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	<i>Persentase ketersediaan data terpilah dalam SIGA</i>	100 %	100 %	30.000.000,00			100 %	35.000.000,00
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data Terpilah dalam SIGA</i>	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00			1 Dokumen	35.000.000,00
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	35.000.000,00
5,	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak	100 %	100 %	220.000.000,00			100 %	172.000.000,00
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah satuan pendidikan yang didampingi menjadi satuan pendidik ramah anak	100 %	-	0,00			100 %	25.000.000,00
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Organisasi	25.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	35 Lembaga	35 Lembaga	220.000.000,00			35 Lembaga	147.000.000,00
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota								
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	30 Orang	60.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Orang	15.000.000,00
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	35.000.000,00
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	97.000.000,00
6,	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Cakupan Layanan terhadap anak korban kekerasan</i>	100 %	100 %	245.800.000,00			100 %	220.000.000,00
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan</i>	35 Lembaga	35 Lembaga	50.760.000,00			35 Lembaga	60.000.000,00
	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA								
			<i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>	60 Orang	20 Orang	50.760.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	20 Orang	60.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	45 Orang	15 Orang	126.020.000,00			15 Orang	60.000.000,00
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	41 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Orang	35,00 0.000,00
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK								
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan	10 Layanan	126.020.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	10 Layanan	25,00 0.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	35 Lembaga	35 Lembaga	69.020.000,00			35 Lembaga	100.000.000,00
	2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota								
			Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3 Kegiatan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Kegiatan	15.000.000,00
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/								
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	60 Orang	20 Orang	69.020.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	20 Orang	15.000.000,00
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	3 Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	20.000.000,00
	2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota								
			Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus	45 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15 Orang	50.000.000,00
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				7.931.298.852,00				9.468.668.134,00
1,	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip	79,32 angka	79,31 angka	4.523.713.852,00			79,32 angka	6.887.668.134,00
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	100 %	5.000.000,00			100 %	29.093.750,00
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	9.187.500,00
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	4.593.750,00
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	4.593.750,00
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.125.000,00
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.593.750,00
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi keuangan yang tepat waktu</i>	100 %	100 %	3.452.874.477,00			100 %	4.688.827.853,00
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	63 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.359.064.477,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	31 Orang/bulan	4.535.212.853,00
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	3 Dokumen	1 Dokumen	54.010.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	144.427.500,00
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.593.750,00
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	4.593.750,00
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi barang milik daerah yang akurat</i>	100 %	100 %	13.200.000,00			100 %	40.425.000,00
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	3 Laporan	1 Laporan	13.200.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	40.425.000,00
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase administrasi kepegawaian yang akurat</i>	100 %	100 %	85.000.000,00			100 %	120.250.000,00
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	216 Paket	40 Paket	35.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72 Paket	76.562.500,00
	2.14.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	3 Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	9.187.500,00
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	11 Orang	10 Orang	50.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Orang	34.500.000,00
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase pelaksanaan administrasi umum</i>	100 %	100 %	665.106.645,00			100 %	1.331.437.188,00
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	6 Paket	181.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	76.562.500,00
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	3 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	7.656.250,00
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	1 Paket	8.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	30.625.000,00
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	1 Paket	8.258.650,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	30.625.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan</i>	3 Dokumen	1 Dokumen	5.600.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	24.806.250,00
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material								
			<i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i>	3 Paket	1 Paket	24.500.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	91.875.000,00
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	36 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Laporan	36.750.000,00
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	300 Laporan	100 Laporan	426.247.995,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 Laporan	1.032.537.188,00
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</i>	100 %	100 %	169.650.000,00			100 %	256.937.187,00
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	15 Unit	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	256.937.187,00
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	1 Unit	169.650.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	0,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	100 %	100 %	18.999.000,00			100 %	114.447.156,00
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	6.125.000,00
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan	1 Laporan	10.999.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	77.697.156,00
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan	1 Laporan	7.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	30.625.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang terpelihara</i>	100 %	100 %	113.883.730,00			100 %	306.250.000,00
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	216 Unit	73 Unit	113.883.730,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72 Unit	306.250.000,00
2,	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk</i>	10 %	10 %	185.000.000,00			10 %	195.000.000,00
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Persentase perangkat (Dinas/Badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB</i>	65 %	60 %	50.000.000,00			65 %	105.000.000,00
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	10 Satuan Pendidikan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Satuan Pendidikan	70.000.000,00
	2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan								
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	12 Organisasi	12 Organisasi	50.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12 Organisasi	35.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	100 %	100 %	135.000.000,00			100 %	90.000.000,00
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga								
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	18 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	35.000.000,00
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga								
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	3 Laporan	1 Laporan	63.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Laporan	10.000.000,00
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB								
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	3 Dokumen	1 Dokumen	72.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Dokumen	10.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain								
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	27 Unit	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Unit	35.000.000,00
3,	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	14,9 %	14,9 %	1.945.631.000,00			14,9 %	1.961.000.000,00
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase peserta KB aktif metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	31,6 %	31 %	867.600.000,00			31,6 %	990.000.000,00
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	1 Laporan	140.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Laporan	100.000.000,00
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana								
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	55 Unit	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	20 Unit	360.000.000,00
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana								
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	3 Laporan	1 Laporan	297.600.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Laporan	270.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)								
			<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	3 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Laporan	120.000.000,00
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang								
			<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Dokumen	50.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal								
			<i>Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan</i>	3 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	60.000.000,00
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja								
			<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	30 Organisasi	10 Organisasi	200.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	10 Organisasi	30.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk</i>	100 %	100 %	141.000.000,00			100 %	270.000.000,00
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)								
			<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	600 Orang	200 Orang	111.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	200 Orang	150.000.000,00
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB</i>	6 Organisasi	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Organisasi	60.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>	18 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	60.000.000,00
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat</i>	100 %	100 %	490.281.000,00			100 %	505.000.000,00
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya</i>	3 Laporan	1 Laporan	30.600.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Laporan	70.000.000,00
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	3940 Orang	1300 Orang	375.381.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1320 Orang	150.000.000,00
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP								
			<i>Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP</i>	3 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	40.000.000,00
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	3 Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	50.000.000,00
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB								
			<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	9 Unit	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Unit	35.000.000,00
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	3 Laporan	1 Laporan	24.300.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Laporan	30.000.000,00
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i>	136 Orang	30 Orang	60.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50 Orang	40.000.000,00
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak								
			<i>Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak</i>	18 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6 Laporan	45.000.000,00
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan								
			<i>Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan</i>	66 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	25 Orang	45.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase perangkat (Dinas/Badan) daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB</i>	65 %	60 %	446.750.000,00			65 %	196.000.000,00
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	3 Dokumen	1 Dokumen	3.750.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 Dokumen	50.000.000,00
	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas								
			<i>Jumlah DASHAT di Kampung KB</i>	2 Unit	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	96.000.000,00

2.14.03.2.04.0006		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas								
N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	37 Kampung	45 Kampung	443.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS- DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	37 Kampung	50.000.000,00
4,	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan</i>	6 Kecamatan	6 Kecamatan	1.276.954.000,00			6 Kecamatan	425.000.000,00
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga</i>	60 %	55 %	188.000.000,00			60 %	325.000.000,00
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>	3 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)								
			<i>Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)</i>	2 Laporan / Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan / Dokumen	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	3 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								
			<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>	6 Unit	4 Unit	48.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	2 Unit	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	120 Orang	30 Orang	60.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	120 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>	3 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	120 Orang	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	40 Orang	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	3 Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	3 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))								
			<i>Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>	30 Kelompok	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Kelompok	25.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)								
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)</i>	3 Dokumen	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	25.000.000,00
	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)								
			<i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</i>	30 Kelompok	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Kelompok	25.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Capaian PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor yang ber-KB mandiri</i>	60 %	55 %	1.088.954.000,00			60 %	100.000.000,00
	2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								
			<i>Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	3 Laporan	1 Laporan	143.954.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000,00
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	30 Organisasi	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10 Organisasi	25.000.000,00
	2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja								
			<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</i>	3 Laporan	-	0,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	25.000.000,00
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)</i>	2 laporan	1 laporan	450.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 laporan	12.000.000,00
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)								
			<i>Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan</i>	2 laporan	1 laporan	495.000.000,00	Kota Prabumulih, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	1 laporan	13.000.000,00
	J U M L A H					8.647.298.852,00				10.120.668.134,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program DPPKBPPPA Kota Prabumulih merupakan program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan DPPKBPPPA kedalam rencana kegiatan setiap program tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program ini didasarkan atas strategi dan kebijakan DPPKBPPPA. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Prabumulih namun juga oleh sumber pendanaan lainnya antara lain APBN (Dana Alokasi Khusus/DAK). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kegiatan
Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : DPPKBPPPA

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota	Advokasi kebijakan dan pedampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendmappingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kabupaten/kota	36 perangkat daerah	15.000.000,00
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	50.740.000,00
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan layanan pengaduan	25 Orang	30.000.000,00
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	40 Orang	109.460.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/kota Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	36 Perangkat Daerah	15.000.000,00
		Penyediaan data gender dan anak kewenangan kabupaten/kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang tersedia	1 dokumen	30.000.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	60.000.000,00
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	30.000.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota	1 Dokumen	130.000.000,00
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/ program/kegiatan pencegahan KTA Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan	125 orang	50.760.000,00
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	20 orang	126.020.000,00
	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	1 orang	69.020.000,00
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	1.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.000.000,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3.359.064.477,00
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	54.010.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000,00
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.200.000,00
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	40 Paket	35.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6 Paket	181.000.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1.500.000,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	8.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	8.258.650,00
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	5.600.000,00
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	1 paket	24.500.000,00
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	10.000.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	426.247.995,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Unit	169.650.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.000.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	10.999.000,00
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	7.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	73 kendaraan	113.883.730,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Program Pengendalian Penduduk	Pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah organisasi yang mengikuti sosialisasi tentang pemanfaatan kajian dampak kependudukan beserta model solusi strategis sebagai peringatan dini dampak kependudukan kepala pemangku kepentingan	12 Organisasi	50.000.000,00
	Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1 laporan	63.000.000,00
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	1 dokumen	72.000.000,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Pengendalian program KKBPK	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK	1 Laporan	140.000.000,00
		Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan bangga kencana	1 Laporan	297.600.000,00
		Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes) dan mini lokakarya (minilok)	1 Laporan	90.000.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah dokumen promosi dan KIE Program bangga kencana keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana) melalui media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	1 Dokumen	100.000.000,00
		Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program bangga kencana sesuai kearifan budaya lokal	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program bangga kencana sesuai kearifan budaya local	1 Dokumen	40.000.000,00
	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana kepada stake holder dan mitra kerja	12 organisasi	200.000.000,00
		Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader IMP	200 Orang	111.000.000,00
	Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah laporan hasil penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program bangga kencana untuk petugas Keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana	1 Laporan	40.000.000,00
		pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelanana KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	1 laporan	30.600.000,00
		Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1320 Orang	375.381.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah tenaga pelayanan yang mengikuti peningkatan kompetensi tenaga pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	1 Laporan	24.300.000,00
				30 orang	60.000.000,00
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Intergrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB	1 dokumen	3.750.000,00
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana	45 kampung	443.000.000,00
			Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	4 unit	48.000.000,00
		Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	30 Orang	60.000.000,00

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah laporan hasil orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	1 laporan	80.000.000,00
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	1 Laporan	143.954.000,00
		Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 Laporan	450.000.000,00
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 Laporan	495.000.000,00

BAB V**PENUTUP**

Pelaksanaan rencana kerja merupakan implementasi pelaksanaan program kegiatan rencana kerja yang telah ditetapkan OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Prabumulih Tahun 2025, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan KB serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Prabumulih untuk mewujudkan **“PRABUMULIH YANG SEJAHTERA DAN MANDIRI”**. Pelaksanaan program kerja tersebut harus dilakukan secara terencana dan terarah dengan melibatkan unsur SDM, hubungan kerja yang baik dengan dinas/instansi dan lembaga kemasyarakatan, dunia usaha, dan perguruan tinggi, serta peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam bidang pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mengacu kepada rencana strategis yang telah disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama, dengan berpedoman kepada aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku.

Diharapkan setelah disusunnya rencana kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih Tahun 2025 ini, pelaksanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan akan lebih terarah dan terpadu, berdaya guna dan berhasil guna dengan memperhatikan aspek efisiensi dalam penggunaan anggaran dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan serta perlindungan anak di Kota Prabumulih.

Rencana kerja DPPKBPPPA Kota Prabumulih ini disampaikan kepada Walikota Prabumulih (sebagai laporan), Kepala Bappeda Kota Prabumulih, dan Inspektur Kota Prabumulih.